

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DIREKTORAT PENYEDIAAN SDM KESEHATAN



Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

<https://ditjen-sdmk.kemkes.go.id>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan RKT tidak terlepas dari Renstra Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi

Kegiatan. Peraturan PermenPAN RB Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2025 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib melaporkan kinerja atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran Penyediaan Tenaga Kesehatan, sehingga penyusunan RKT merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan.

Sebagai bagian dari sebuah manajemen dalam mencapai kinerja yang baik, RKT disusun melalui tahapan sebuah pemikiran yang kritis dimana dalam penyusunan tersebut mengacu kepada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang telah disusun dalam periode 5 tahun. Secara lebih teknis dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target dan sasaran indikator dijabarkan dalam RKT. Rencana Kinerja Tahunan memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja yang telah dicapai serta memberikan gambaran tentang target dan pendanaan yang tersedia dalam mencapai kinerja tahun 2025. RKT digunakan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga dapat menciptakan tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RKT ini, namun kami menyadari masih terdapat kekurangan, untuk itu saran, kritik, dan masukan sangat diharapkan guna

perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga dokumen RKT ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2025

Direktur Penyediaan SDM Kesehatan



Anna Kurniati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Struktur Organisasi.....	3
BAB II	4
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	4
A. Visi.....	4
B. Misi.....	5
C. Tujuan	5
D. Sasaran	7
E. Rencana Kegiatan	9
BAB III	12
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022-2024.....	12
A. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024.....	12
B. Analisis hambatan, kendala dan permasalahan dalam mencapai Indikator Kinerja Tahun 2022-2024.....	13
BAB IV	27
RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	27
A. Kebijakan	27
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025	29
C. Pendanaan	34
A. Rencana Pencapaian Target Indikator	40
BAB V	40
MONITORING DAN EVALUASI	40
BAB VI	41
PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029	5
Tabel 2. 2 Cascading Tujuan, Sasaran, Indikator Tahun 2025-2029.....	7

Tabel 2. 3 Rencana Pencapaian Target IKK Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan Tahun 2025	9
Tabel 2. 4 Rencana Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan berdasarkan Triwulan Tahun 2025	10
Tabel 3. 1 Rencana Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan berdasarkan Triwulan Tahun 2025.....	12
Tabel 3. 2 Target dan capaian Rincian Output (RO) Dit.Penyediaan SDM Kesehatan	24
Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Kegiatan SDM Kesehatan, Renja K/L dan Perjanjian Kinerja.....	30
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Berdasarkan KRO/RO Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2025	32
Tabel 4. 3 Alokasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2025	35
Tabel 4. 4 Alokasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan Tahun 2025	36

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Di Daerah Prioritas Yang Menerima Beasiswa Pendidikan	15
Grafik 3. 2 Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Jumlah SDM Kesehatan Yang Di Tingkatkan Kompetensinya Melalui Beasiswa Jalur Pendidikan Tahun 2021-2024.....	16

Grafik 3. 3 Capaian Kinerja Indikator Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan SDM Kesehatan tahun 2022-2024.....	18
Grafik 3. 4 Grafik Capaian program AHS tahun 2022-2024.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan telah di tetapkan dalam menjawab tantangan Kesehatan yang semakin kompleks. Perubahan pola penyakit yang semakin variatif dan meningkat

memperberat beban Kesehatan Masyarakat sehingga perlu direspons dengan penguatan sistem Kesehatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomo 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya Integrasi data antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk memastikan deteksi dini, pelaporan dan penanggulangan penyakit secara cepat dan akurat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan periode tahun 2025-2029. Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, rincian kinerja output dan rincian output.

RKT ini merupakan bagian rangkaian dari proses perencanaan dan komitmen yang memuat target kinerja yang akan dicapai oleh Direktorat SDM Kesehatan pada satu tahun. Rencana kerja tersebut pada pelaksanaannya mengacu pada Renja dan Renstra Kementerian Kesehatan dan juga menjadi tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tupoksi Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan.

Pada tahun 2024 Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan telah menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja dan rata-rata capaian telah tercapai 100%. Tahun 2025 telah tercapai sebanyak 4 Indikator Kegiatan yaitu :

1. Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit
2. Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan sesuai kebutuhan
3. Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang lulus Uji Kompetensi

4. Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan

Dalam rangka lancarnya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator tersebut, maka perlu dilakukan perencanaan capaian kinerja yang akan menjadi acuan atau pedoman terhadap pelaksanaan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk melihat dan sekaligus mengevaluasi pencapaian kinerja Direktorat Penyediaan SDK Kesehatan dalam satu tahun berjalan.

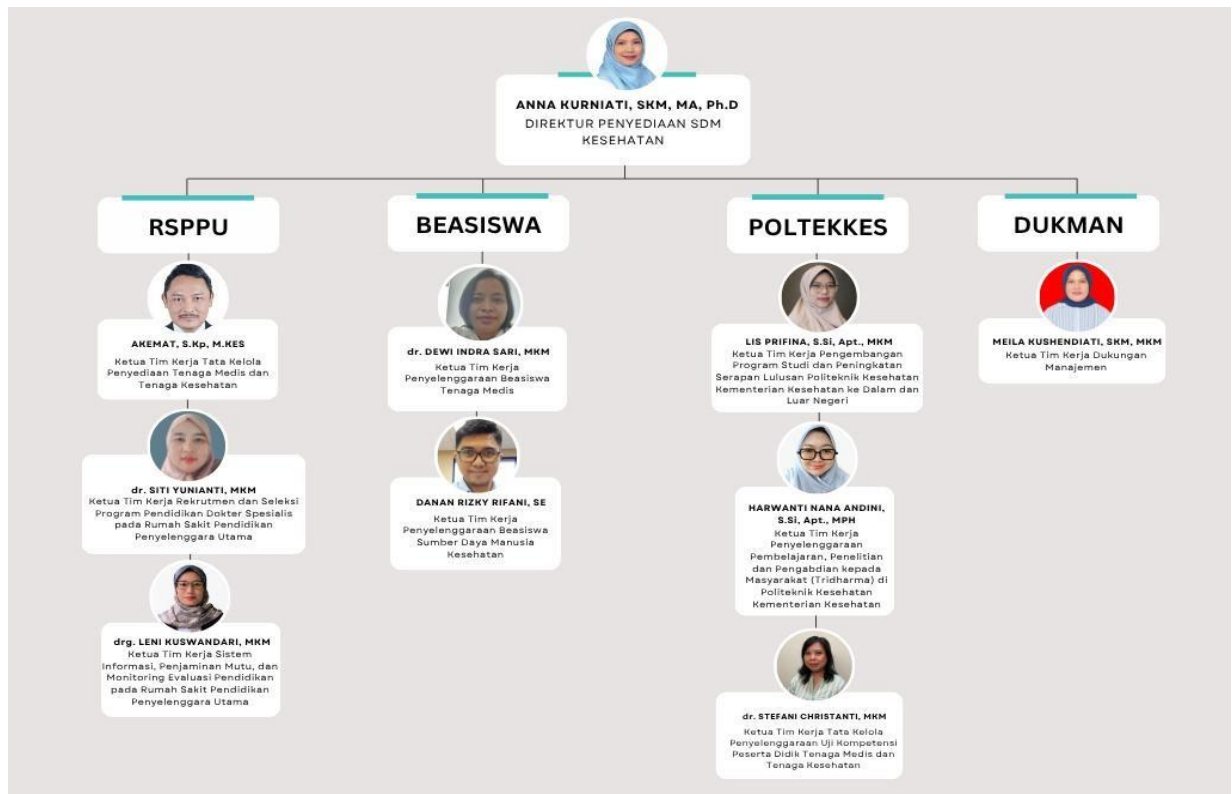
B. Struktur Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Dalam bagian kelima pasal 152, Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan sumber daya manusia kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, adalah **Indonesia Emas 2045** yang kemudian dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Selaras dengan visi pada RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025-2029, yaitu **Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045**. Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan tidak memiliki visi dan misi, namun mengacu pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2024-2029 dan visi misi Kementerian Kesehatan Tahun 2024-2029.

B. Misi

Misi Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan mengacu dan mendukung misi Kementerian Kesehatan yaitu melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas)”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas Nasional ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- a. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
- b. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
- c. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
- d. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
- e. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
- f. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif dan efisien

Dalam mencapai keenam misi Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan mendukung misi kedua yaitu memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau.

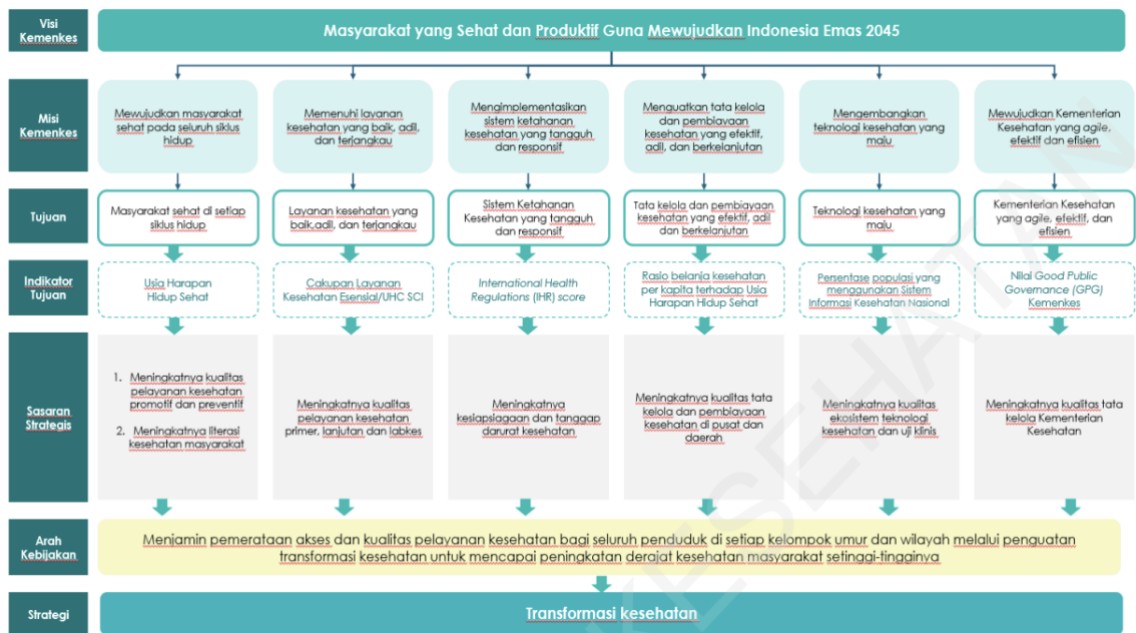
C. Tujuan

Tujuan Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan mendukung pencapaian visi Kementerian Kesehatan dan 6 (enam) tujuan Kementerian Kesehatan, dengan 6 (enam) indikator tujuan untuk tahun 2025-2029 yaitu:

***Tabel 2. 1 Indikator Tujuan Kementerian Kesehatan
Tahun 2025-2029***

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	Usia harapan hidup Sehat/ <i>Healthy Adjusted Life Expectancy</i> (HALE)
2	Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau	Cakupan Layanan Kesehatan Esensial/ <i>Universal Health Coverage (UHC) Service Coverage Index</i>
3	Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif	<i>International Health Regulations (IHR) score</i>
4	Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan	Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat
5	Teknologi Kesehatan yang Maju	Persentase populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)
6	Kementerian Kesehatan yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Nilai <i>Good Public Governance (GPG)</i> Kementerian Kesehatan

Sesuai dengan tujuan diatas, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan mendukung tujuan kedua yaitu layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau dengan indikator tujuannya, yaitu Cakupan Layanan Kesehatan Esensial/ *Universal Health Coverage (UHC) Service Coverage Index* dan tujuan ke enam, yaitu Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien dengan tujuan indikatornya, yaitu Nilai *Good Public Governance (GPG)* Kementerian Kesehatan. Berikut adalah Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Kementerian Kesehatan:



D. Sasaran

Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan mendukung tujuan kedua Kementerian Kesehatan yaitu layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, dengan sasaran strategis yaitu meningkatkannya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes. Sasaran strategis ini salah satunya dilaksanakan melalui indikator sasaran strategis (ISS), yaitu tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan, dengan sasaran program yaitu meningkatkannya ketersediaan SDM Kesehatan yang berkualitas dan indikator kinerja program yaitu persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya, maka ditetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan periode 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Cascading Tujuan, Sasaran, Indikator Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis (SS) / Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tujuan 2. Layanan Kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau				
SS 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes				

Tujuan/ Sasaran Strategis (SS) / Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
ISS 17. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Sasaran Program: Meningkatnya ketersediaan SDM yang berkualitas	IKP 17.3 Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	IKK 17.3.1 Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan
			Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi SDM Kesehatan	IKK 17.3.5 Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit
				IKK 17.3.6 Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan
				IKK 17.3.7 Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi

Sasaran Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan
- b) Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

- c) Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan
- d) Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi

E. Rencana Kegiatan

1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pencapaian Indikator Kinerja

Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan telah menyusun kertas kerja dalam rangka pencapaian indikator kinerja dan kinerja output per triwulan, untuk memudahkan monitoring sehingga dapat diketahui kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan dan menjadi masukan dalam perbaikan pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Rencana pencapaian target indikator dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Rencana Pencapaian Target IKK Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan Tahun 2025

No	Indikator	Target	Rencana Pencapaian Target				Rencana Capaian 2025
			TW1	TW2	TW3	TW4	
1	IKK.17.3.1 Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan	75	15	30	50	75	75
2	IKK 17.3.5 Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit	38	38	0	0	0	38
3	IKK 17.3.6 Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan	91	20	45	70	91	91

No	Indikator	Target	Rencana Pencapaian Target				Rencana Capaian 2025
			TW1	TW2	TW3	TW4	
	Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan						
4	IKK 17.3.7 Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi	93	85	90	92	93	93

2. Rencana Pelaksanaan Anggaran

Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan telah menyusun rencana pelaksanaan anggaran selama periode satu tahun berjalan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Untuk mempermudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran, rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran dibreakdown per triwulan dan bulanan, sehingga dapat diketahui kemajuan dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut. Rencana pelaksanaan anggaran Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan tahun 2025 per triwulan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan berdasarkan Triwulan Tahun 2025

No	Indikator	Target	Pagu	Triwulan
----	-----------	--------	------	----------

				I	II	III	IV
1	Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit	38	4.500.621.000	450.062.100	1.350.186.300	2.025.279.450	675.093.150
2	Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan	91%	484.156.999.000	48.415.699.900	145.247.099.700	217.870.649.550	72.623.549.850
3	Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi	93%	24.225.085.000	2.422.508.500	7.267.525.500	10.901.288.250	3.633.762.750
4	Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan	75%	17.885.857.000	1.788.585.700	5.265.757.100	8.048.635.650	2.682.878.550
Jumlah			530.768.562.000	53.076.856.200	159.130.568.600	238.845.852.900	79.615.284.300

BAB III

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022-2024

A. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan tahun 2022-2024

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan, terdapat 8 indikator kinerja Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan tahun 2022-2024, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Rencana Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan berdasarkan Triwulan Tahun 2025

No	Indikator	2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan	500	512	102.40 %	800	800	100.0%	900	970	107.78 %
2	Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan dokter	50%	70.89%	142%	80%	80.16%	100.2%	100%	100%	100%
3	Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan	1.314	1.314	100.00 %	1.500	1.314	87.60%	1500	1314	87.60 %
4	Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan SDM Kesehatan	70%	70%	100%	80%	88%	110.0%	90%	90%	100.00 %
5	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur pendidikan	1400	1569	112.07 %	1.760	1.882	106.93 %	1660	1676	100.96 %
6	Jumlah Perguruan Tinggi yang melaksanakan program AHS	30	70	233%	50	77	154%	70	82	117%
7	Persentase dr spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase lulusan Poltekes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di puskesmas	40%	40.31%	101%	45%	48.68%	108.18 %	50%	58%	66%

B. Analisis hambatan, kendala dan permasalahan dalam mencapai Indikator Kinerja Tahun 2022-2024

a. Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan

Program Afirmasi dokter bertujuan untuk mempercepat pemenuhan penyediaan tenaga kesehatan terutama di daerah bermasalah kesehatan dan DTPK. Berdasarkan data SISDMK Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan bulan Februari Tahun 2023, dari 10.428 Puskesmas, sebanyak 97,49 puskesmas sudah memiliki tenaga dokter, namun masih ada 272 puskesmas yang belum memiliki dokter. 272 puskesmas tersebut tersebar di Papua Barat (16 PKM), Papua (152 PKM), Maluku (29 PKM), Nusa Tenggara Timur (21 PKM), dan Sulawesi Tenggara (7 PKM). Atas dasar tersebut untuk mendorong ketersediaan dan pemenuhan dokter, salah satu strateginya dengan memberikan beasiswa pendidikan dokter baik dari nol tahun maupun yang sudah berproses pendidikan. Program ini diutamakan peserta dari daerah bermasalah kesehatan dan DTPK. Hingga tahun 2023, program afirmasi dokter telah memberikan beasiswa kepada 1.312 orang dengan rincian 512 orang (tahun 2022) dan 800 orang (tahun 2023). Pada tahun 2024 telah di berikan beasiswa kepada 970 orang, sehingga jumlah total pemberian beasiswa menjadi Dalam pemberian bantuan pendidikan afirmasi dokter sebanyak 2.282 orang. Sampai saat ini, sebanyak 24 orang yang telah lulus dan akan mengikuti interenship dan bahkan langsung mengabdikan dan telah lulus sebanyak 77 orang.

Tantangan dalam program afirmasi ini adalah bagaimana jaminan pendayagunaan lulusan dapat bekerja sesuai dengan rencana pemenuhan dan pemerataan serta daerah bersedia mendayagunakannya.

b. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan dokter

Program Afirmasi dokter dirumuskan dalam rangka percepatan pemenuhan tenaga kesehatan terutama dokter umum dan dokter gigi. Kurangnya tenaga dokter umum dan dokter gigi terutama di daerah bermasalah kesehatan dan DTPK, mendorong pemerintah berfikir keras dalam penyediaan, distribusi untuk pemerataan terutama daerah

terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan DBK. Sampai dengan tahun 2023 sebanyak 80,16% (202 daerah dari 252) daerah yang telah terakomodir mendapatkan beasiswa afirmasi dokter. Tahun 2024 sebanyak 100% (210 dari 210 kab/kota). Harapannya dengan peserta dari daerah DTPK dan DBK akan kembali ke daerah pengusul tersebut sehingga tinggi retensi dan pemenuhan tenaga dokter dapat terwujud. Pada tahun 2024 telah meluluskan 24 orang yang akan dilanjutkan dengan proses internsip dokter.

Tantangan dalam program afirmasi ini adalah bagaimana jaminan pendayagunaan lulusan dapat bekerja sesuai dengan rencana pemenuhan dan daerah bersedia mendayagunakannya.

c. Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa Pendidikan

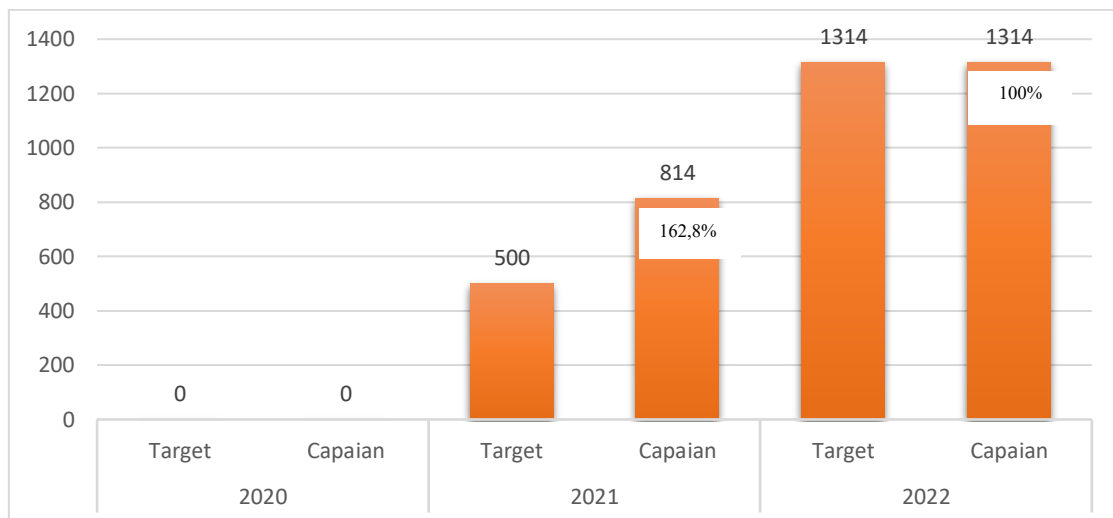
Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (**PADINAKES**) adalah program keberpihakan pemerintah yang diatur secara khusus untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada siswa lulusan SMA sederajat yang berasal Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan beberapa wilayah tertentu dengan permasalahan kesehatan dan/atau mahasiswa pada tahun terakhir yang akan ditempatkan di DTPK dan daerah dengan permasalahan kesehatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Program ini dimaksudkan untuk pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mengatasi kekurangan jenis tenaga kesehatan dan tidak meratanya distribusi dan meningkatkan retensi tenaga kesehatan di fasilitasi pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan. Dalam Permenkes Nomor 27 tahun 2021 program afirmasi Padinakes pada pasal 9 disebutkan bahwa untuk calon peserta dapat berasal dari lulusan SMA atau sederajat atau mahasiswa tingkat akhir pada Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes.

Program PADINAKES ditetapkan menjadi indikator kinerja sejak tahun 2020, namun pada tahun 2020 target dari indikator ini masih nol. Hal ini disebabkan karena awalnya indikator ini merupakan indikator

given, sehingga secara regulasi dalam pengaturan secara teknis pelaksanaan belum siap. Maka, pada tahun 2020 pelaksanaan indikator ini dalam rangka mempersiapkan perangkat regulasi seperti Permenkes, draft pedoman dan hal lainnya.

Hingga tahun 2023 telah diberikan beasiswa kepada 1.314 orang yang termuat dalam SK Kepala Dirjen Tenaga Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan No.HK.02.02/F/1734/2022 tentang peserta penerima bantuan dana Pendidikan program afirmasi Pendidikan tinggi tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2022.

Grafik 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Di Daerah Prioritas Yang Menerima Beasiswa Pendidikan



Sejak tahun 2023 program afirmasi padinakes tidak menerima peserta baru. Permasalahan atau kendala tidak tercapainya program Afirmasi disebabkan sebagai berikut :

1. Terdapat permasalahan dalam pendayagunaan lulusan program PADINAKES:
 - Pemerintah daerah belum dapat mendayagunakan baik melalui CPNS, P3K, atau mekanisme lain karena adanya keterbatasan fiskal
 - Adanya kebijakan pengadaan pegawai pemerintah, hanya melalui ASN dan PPPK, menyulitkan bagi lulusan Afirmasi Padinakes untuk mengikuti PPPK karena terdapat persyaratan minimal memiliki pengalaman kerja 2 (dua) tahun

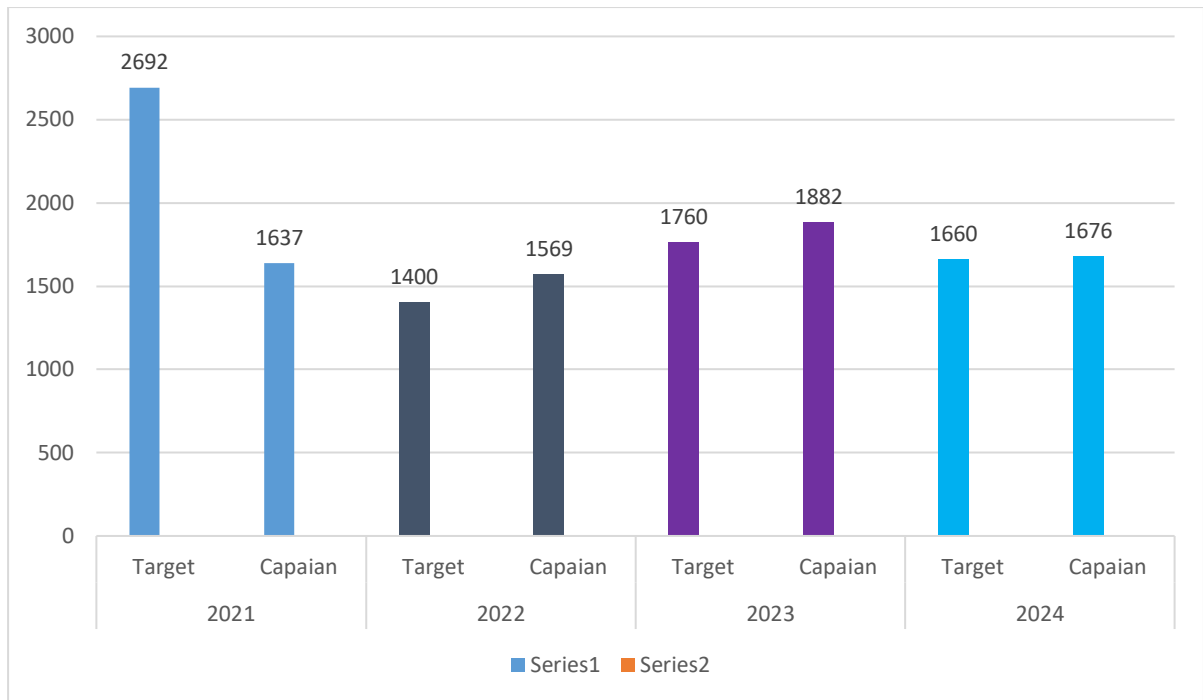
- Sulitnya pendayagunaan lulusan PADINKES sehingga pada tahun 2023 penerimaan peserta baru program PADINAKES dihentikan.
- 2. Melanjutkan pemberian bantuan pendidikan bagi peserta lanjutan program PADINAKES yang telah direkrut tahun 2021 dan 2022
- 3. Melakukan pertemuan pembahasan formasi CPNS dan PPPK dengan stakeholders terkait seperti BKN, Kemenpan Reformasi Birokrasi, Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

d. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur Pendidikan

Program bantuan biaya Pendidikan bagi SDM Kesehatan (tugas belajar) dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualifikasi SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Program ini bertujuan untuk pemenuhan SDM Kesehatan, baik Pusat (Kemenkes) maupun daerah. Pelaksanaan tugas belajar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar SDM Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut, jenis Pendidikan yang dapat di berikan tugas belajar meliputi Pendidikan vokasi, akademik dan profesi. Jenjang Pendidikan yang dapat diberikan sampai pada Doktoral.

Pelaksanaan pemberian tubel di kemenkes sudah dimulai sejak lama, Direktorat Penyediaan tenaga kesehatan mengawal pemberian beasiswa tubel sejak tahun 2022 dengan jumlah peserta pemberian beasiswa yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Tahun 2023 telah tercapai sebanyak 1.882 orang dan di tahun 2024 dengan target 1.660 orang dan sudah tercapai sebanyak Pelaksanaan pemberian beasiswa ini disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Grafik 3. 2 Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Jumlah SDM Kesehatan Yang Di Tingkatkan Kompetensinya Melalui Beasiswa Jalur Pendidikan Tahun 2021-2024



Indikator ini sebelum nya berada pada Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, adanya perubahan struktur organisasi dan pembagian tugas dan fungsi, indikator kinerja tugas belajar pindah ke Dit. Penyediaan Tenaga Kesehatan.

Capaian pada tahun 2021 sebesar 60,81% atau 1.637 orang yang diberikan bantuan pendidikan dari target 2.692 orang. Pada tahun 2022 capaian 112,1% atau 1.569 orang dari target 1.400 orang. Hingga tahun 2024 telah diberikan beasiswa sebanyak 1676 atau sebanyak 100,9%. Rendahnya capaian pada tahun 2021 disebabkan karena terdapat peserta yang tidak lulus secara administrasi. Berdasarkan Surat Edaran Nomor DM.02.01/V/1950/2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2021 batas usia penerimaan peserta tubel untuk tenaga kesehatan di DTPK 47 tahun dan Non DTPK 42 tahun, sedangkan untuk non kesehatan, untuk DIII ke S1, DIII ke DIV DTPK 37 tahun, non DTPK 25 tahun. Sedangkan untuk S1 ke SII batas usia DTPK 42 tahun Non DTPK 37 tahun. Sedangkan pada tahun sebelumnya batas usia adalah 42 tahun. Batas usia menjadi salah satu kendala dalam kelulusan administrasi sehingga banyak pendaftar yang tidak lulus.

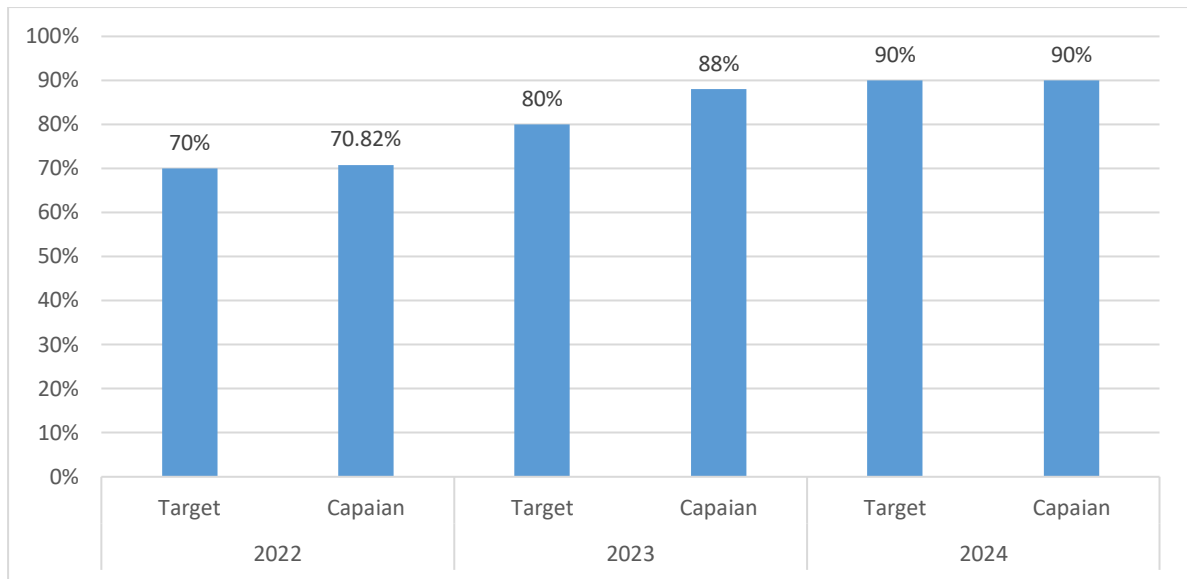
e. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan SDM Kesehatan

Sebanyak 879 orang peserta yang telah mendapatkan bantuan pendidikan, kemudian akan ditugaskan pada daerah prioritas untuk pemenuhan tenaga kesehatan, pada tahun 2022 telah tercapai sebanyak 71% daerah yang telah kembali mendapatkan penugasan ke daerah prioritas. Dari 305 daerah prioritas yang telah ditentukan berdasarkan peraturan, sudah sebanyak 216 orang (71%) yang berhasil ditempatkan ke daerah prioritas.

Pada tahun 2023 telah diberikan 88% atau 132 daerah yang telah mengikuti tugas belajar dari 150 daerah. Tahun 2022 telah tercapai sebanyak 70,82% atau 216 daerah yang telah mendapatkan beasiswa pendidikan dari 305 daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah prioritas. Pada tahun 2023 telah terpenuhi oleh beberapa daerah sehingga beberapa daerah prioritas telah terpenuhi. Tahun 2024 telah tercapai 90% (153/170) kab/kota dari target 90%. Penetapan daerah prioritas tersebut di dasarkan pada Peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan HK.02.02/MENKES/367/2015 tentang Daerah Perbatasan, Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017, PMK Nomor 027 tahun 2012 tentang Daerah Bermasalah Kesehatan dan Kepdirjenyankes HK.02.02/II/0373/2019 tentang Daerah terpencil.

Indikator ini untuk melihat jumlah daerah yang telah terpenuhi kebutuhan SDM Kesehatan setelah dilakukan program tugas belajar SDM Kesehatan. Indikator ini baru dirumuskan tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian kinerja berdasarkan triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3. 3 Capaian Kinerja Indikator Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan SDM Kesehatan tahun 2022-2024



f. Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan

Program pemberian bantuan beasiswa bagi dokter spesialis dirumuskan dalam rangka percepatan pemenuhan bagi kekurangan dokter spesialis terutama 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis lainnya. Selain itu pemenuhan dokter spesialis juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan 9 penyakit prioritas yang menjadi penyebab kematian tertinggi dan berbiaya terbesar diantaranya Stroke, jantung, kanker, diabetes, ginjal, hati, maternal neonatal, tuberculosis dan infeksi emerging.

Sampai dengan tahun 2023 sudah tercapai sebanyak 421 orang yang di kembalikan ke daerah pengusul untuk melakukan pengabdian melalui Surat Keputusan dan dinyatakan dengan SPMT. Target pada tahun 2024 sebanyak 100% dan telah tercapai sebanyak 100% (367/367 orang) yang telah dikembalikan ke daerah pengusul untuk melakukan pengabdian.

g. Jumlah Perguruan Tinggi yang melaksanakan program AHS

Penyelenggaraan sistem kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pemangku kebijakan (stakeholders) yang saling terkait. Sistem Kesehatan Nasional mengamanatkan adanya sinergi di antara para pemangku kebijakan bidang kesehatan dalam pemenuhan

indikator kesehatan, dilandaskan pada prinsip *good governance* dan efisiensi. Kebutuhan akan sinergi lintas pemangku kebijakan diperkuat dengan kompleksitas pengelolaan kesehatan paska otonomi daerah yang memerlukan koordinasi yang terstruktur terkait standardisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan yang setara dalam mewujudkan keberhasilan sistem kesehatan di Indonesia.

Beberapa sistem diluar sistem kesehatan memiliki pengaruh langsung terhadap pencapaian keberhasilan kesehatan, dimana salah satu yang prominen adalah Sistem Pendidikan Tinggi Nasional. Penanganan terhadap permasalahan kesehatan terkini di Indonesia memberikan gambaran bahwa integrasi antara institusi kesehatan dan pendidikan tinggi adalah keniscayaan. Sebaliknya, institusi kesehatan juga berperan dalam pengembangan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dalam menyediakan wahana bagi institusi pendidikan tinggi dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya, yaitu menghasilkan inovasi-inovasi berbasis bukti yang berdampak positif bagi masyarakat luas. Urgensi terhadap integrasi kedua sistem tersebut membutuhkan sebuah model untuk mengakomodir potensi masing-masing institusi ke dalam satu rangkaian visi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, sehingga terbangun ekosistem kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Model ini dikenal sebagai model *Academic Health System* (AHS).

AHS merupakan perluasan dari model integrasi sistem pendidikan tinggi dan kesehatan dengan melibatkan pemangku kebijakan kesehatan daerah dalam mempercepat capaian indikator kesehatan di satu wilayah. AHS juga dikenal dengan berbagai terminologi, diantara *Academic Health Science Center* (AHSC) dan *Academic Health Science Network* (AHSN). Berbagai literatur menjelaskan manfaat penyelenggaraan AHS di berbagai setting, mencakup terselenggaranya sistem kesehatan dan pendidikan tinggi yang adaptif dan berbasis kebutuhan; mutu pelayanan kesehatan yang tinggi, melalui dukungan pendidikan dan penelitian yang tepat guna serta berbasis *continuous improvement*; percepatan implementasi inovasi berbasis riset pada setiap elemen pembangunan

sistem kesehatan; serta model kerja berbasis kolaborasi mutualisme, yang berujung pada efisiensi kinerja, sumber daya, dan anggaran.

Konsep AHS terekognisi secara nasional melalui pembentukan Komite Bersama pengembangan AHS antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan, yang berujung pada terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55/M/KPT/2018 yang mengamanatkan pengembangan awal AHS pada lima pilot center. Hal ini diperkuat dengan ditandatanganinya SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada 12 Juli 2022 dengan fokus pada peningkatan kuota dokter umum, peningkatan Ratio Dosen:Mahasiswa dokter spesialis, Peningkatan Dosen NIDK, penugasan 5 FK, dan yang lainnya.

Berbagai kebermanfaatan yang dihasilkan oleh implementasi piloting AHS tersebut memicu urgensi dalam perluasan implementasi AHS yang menjangkau Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan Utama, dan Dinas Kesehatan di luar wilayah piloting. Perluasan ini diharapkan dapat menginisiasi berbagai kerjasama integratif antara sektor kesehatan dan pendidikan tinggi, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat di sebagian besar daerah di Indonesia. Implementasi AHS juga dapat membantu percepatan pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis sebagaimana diamanatkan oleh program Transformasi Sistem Kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan. Implementasi AHS diharapkan dapat mengembangkan solusi yang inovatif terhadap isu pemenuhan dokter spesialis berbasis sinkronisasi *demand and supply* di antara stakeholders yang terlibat dalam AHS.

Pemenuhan Dokter - Dokter Spesialis melalui Skema Academic Health System (AHS)



Stakeholder partner lainnya: **Kemenkeu, Kemempn-RB, dan Kementerian PU-PR**

Konsep AHS sebagai bagian upaya pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan

The infographic shows the AHS model involving **FK** (Faculty of Medicine), **RSP** (Specialized Referral Hospital), and **PEMDA** (Local Government). It references **SK Pokja AHS No.DM.02.03/Wamenkes/27/2022**. A map of Indonesia is shown with icons for **USU, UN PAD, UI, UGM, UIN Ar, UIN HAS**.

Current Status:

- Puskesmas tanpa dokter
- RS yang belum memiliki 7 jenis spesialis

Standards:

- Puskesmas dan RSUD belum sesuai dengan standar
- Semua Puskesmas memiliki dokter
- Puskesmas dengan dokter sesuai standar
- RS dengan dokter spesialis sesuai standar

Workforce Ratios:

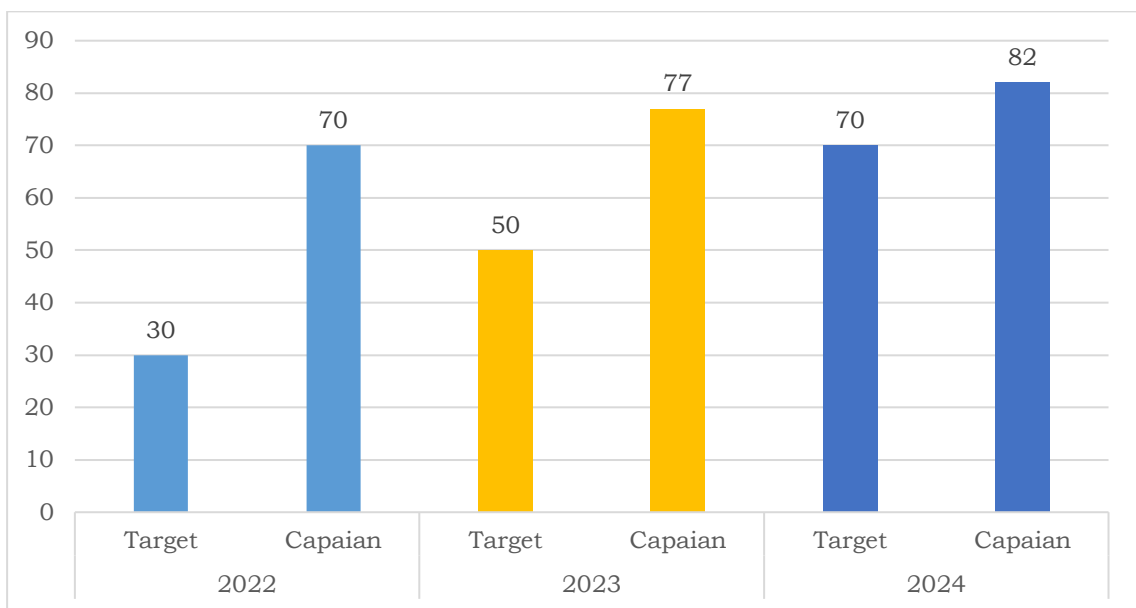
- Ratio dokter **0,42** / 1000 penduduk dan Dokter spesialis **0,15**/1000 penduduk
- Ratio dokter **1:1000** penduduk dan Ratio dokter spesialis **0,28:1000** penduduk

Pendekatan AHS berbasis kewilayahan

Untuk mendukung tercapainya konsep transformasi kesehatan. Konsep AHS ini dianggap penting di terapkan secara baik dan maksimal oleh Kementerian Kesehatan, sehingga pada tahun 2022 AHS dijadikan salah satu indikator kinerja. Pada tahun 2022 ini ditetapkan 30 Perguruan Tinggi yang direkomendasikan oleh Tim AHS untuk melaksanakan AHS. Sampai saat ini sudah 70 FK (233,3%) yang menandatangani lembar komitmen untuk berkomitmen dalam melaksanakan AHS yang telah direkomendasikan oleh Tim AHS. Pelaksanaan AHS dalam rangka mendukung transformasi permasalahan disparitas dalam pelayanan kesehatan dengan mengintegrasikan pendidikan kesokteran, rumah sakit pendidikan dan jejaringnya dibentuk dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan dalam mendukung pemenuhan dan pemerataan kebutuhan dokter dan dokter spesialis (*Crosscutting*). Sebanyak 70 FK di

Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan konsep AHS ini. Ini merupakan suatu hal yang membahagiakan, sehingga diharapkan AHS ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal serta berdampak pada pelayanan kesehatan, khususnya mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sampai dengan 2023 telah 77 FK yang berkomitmen dalam melaksanakan program AHS. Target hingga 2024 akan telah tercapai sebanyak 82 FK dari target 70 FK yang akan berkomitmen melaksanakan program AHS.

Grafik 3. 4 Grafik Capaian program AHS tahun 2022-2024



h. Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas

Poltekkes Kemenkes merupakan unit pelaksana teknis Kemenkes di bidang penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan. Kehadiran Poltekkes Kemenkes di harapkan dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan di bidang Kesehatan. Lulusan Poltekkes diharapkan dapat mengisi lokus-lokus layanan kesehatan yang kurang ataupun yang masih kosong terutama di fasyankes pemerintah baik Pusat, Daerah, TNI/Polri dan instansi kesehatan lainnya.

Lulusan Poltekkes Kemenkes, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pemenuhan 7 jenis tenaga kesehatan di

Puskesmas. Tujuh (7) jenis tersebut yaitu perawat, bidan, gizi, ATLM, sanitarian, kesmas dan promkes. Pada tahun 2022, Lulusan Poltekkes Kemenkes memberikan kontribusi dalam penemuan tenaga kesehatan baik di Puskesmas maupun di fasyankes lainnya termasuk layanan kesehatan seperti Dinas Kesehatan. Pada tahun 2023 sebanyak 2.643 (48.68%) lulusan yang bekerja di Puskesmas telah mengisi mengisi 5.429 jenis tenaga kesehatan yang belum memiliki 7 jenis tenaga kesehatan. Capaian lulusan telah tercapai 40,31 % dari target 40% lulusan poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas. Tahun 2023 sebanyak 2.357 orang lulusan (7 jenis nakes) yang bekerja di Puskesmas untuk mengisi sebanyak 6.293 jenis nakes (7 jenis nakes) yang dibutuhkan untuk memenuhi standar minimal di Puskesmas. Sedangkan sampai dengan tahun 2024 telah tercapai sebanyak 58% (115%) (2.966 Org/5.151 Org).

Meskipun capaian kinerja ini sudah memenuhi target, namun masih ada beberapa permasalahan dalam tracer study, diantaranya :

1. Masih rendahnya cakupan tracer study yang dilaksanakan oleh Poltekkes (Respon rate 51%)
2. Belum tersedianya sistem pemantauan *tracer study* yang terintegrasi
3. Belum adanya keseragaman mekanisme dan instrumen pelaksanaan tracer study

Saat ini terus melakukan koordinasi dengan *Digital Transformation Office (DTO)* Kemenkes untuk dapat dilakukan integrasi aplikasi.

Tantangan yang dihadapi adalah respons rate atau cakupan tracer study yang masih rendah, sehingga diperlukan strategi yang lebih menarik agar para lulusan mau mengisi data tracer study.

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja, telah di susun rincian output kinerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Berikut disampaikan target dan capaian RO, sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Target dan capaian Rincian Output (RO) Dit.Penyediaan SDM Kesehatan

Kode	Rincian Output	Target	Satuan	Capaian TA 2024
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			
DL.6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan			
ADA	Standarisasi Produk	5	produk	5 produk
ADA.002	Soal Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (SDM-21)	5	produk	5 Keperawatan anastesi, radiologi, OP, OT, Sanitasi Lingkungan
AEC	Kerja sama	1	kesepakatan, dokumen, kegiatan	1 Kesepakatan, dokumen, kegiatan
AEC.001	Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan (SDM-21)	1	kesepakatan	1 Kesepakatan
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	7 NSPK
AFA.001	Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Terintegrasi IDUKA (SDM-21)	6	NSPK	6 NSPK
AFA.002	Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan-Penyelenggara Utama (RSP-PU)	1	NSPK	1 NSPK
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	184	Lembaga	240
BDB.003	Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Kinerja Publikasi, Penelitian dan Pengabmasnya (SDM-21)	38	Lembaga	38 lembaga
BDB.004	Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	38	Lembaga	38 lembaga
BDB.006	Perguruan Tinggi Yang Melaksanakan Program Academic Health System (LR-11)	70	Lembaga	82 Lembaga
BDB.008	Fasilitasi Pengembangan Transformasi Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	38	Lembaga	38 Lembaga
CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7	Unit	7 Unit
CCL.001	Pemeliharaan Sistem Informasi Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan	7	Unit	7 Unit
DBA	Pendidikan Tinggi	114	Orang	

Kode	Rincian Output	Target	Satuan	Capaian TA 2024
DBA.001	Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Berprestasi (SDM-21)	114	Orang	114 orang 1. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Poltekkes Kemenkes Tk.Nasional ==> 38 Org 2. Internasional Student Championship=> 45 org 3. Penilaian dan Pelaksanaan Dosen Berprestasi=> 38 orang
DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	370	Orang	493 orang
DCI.001	Dosen dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kompetensinya terkait IDUKA dan AHS (SDM-21)	370	Orang	493 orang
FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1	Daerah	1 Daerah
FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah	1	Daerah	1 Daerah
PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	15	Rekomendasi Kebijakan	17 Rekomendasi (6 RSPPU 11 Rekomendasi)
PBG.001	Akselerasi Rekomendasi Produksi Dokter dan Dokter Spesialis (SDM-21)	15	Rekomendasi Kebijakan	17 Rekomendasi (6 RSPPU 11 Rekomendasi)
QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	6,393	Orang	6,467 orang
QEJ.001	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) (SDM-21)	3,409	Orang	3,409 orang
QEJ.002	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat (SDM-21)	100 (Lanjutan : 80 orang, Baru : 20 orang)	Orang	88 orang lanjutan : 75 baru 13
QEJ.003	Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan (SDM-21)	1,660 (Lanjutan : 1246 orang, Baru : 414 orang)	Orang	1,676 (Lanjutan 1246 Baru : 430)

Kode	Rincian Output	Target	Satuan	Capaian TA 2024
QEJ.004	Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan (SDM-21)	900 (Lanjutan : 1300 orang, Baru : 900 orang)	Orang	970 orang
QEJ.006	Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK (SDM-21)	324	Orang	325 orang dengan rician : Lulus tahun 2024 : 109 orang Lulus tahun 2025 : 215 orang
SBA	Pendidikan Tinggi	1,500	Orang	1,500 orang
SBA.001	Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kemenkes Yang Didayagunakan di Fasyankes Pemerintah (SDM-21)	1,500	Orang	1,500 orang
WA	Program Dukungan Manajemen (Tubel)	1315 Target menjadi : 1.100==> 1.100==> 1024 1. Lanjutan 815 ==> 800=>751 2 Baru 500 ==> 300==>273	Orang	Jan-Juni (795+273)= 1.068 (97,09%) Juli-Des (751+273) =1024 (100%)

BAB IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Kebijakan

Dalam konsep pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*Result Oriented Government*), maka dalam Permenkes Nomor 48 tahun 2017 tentang

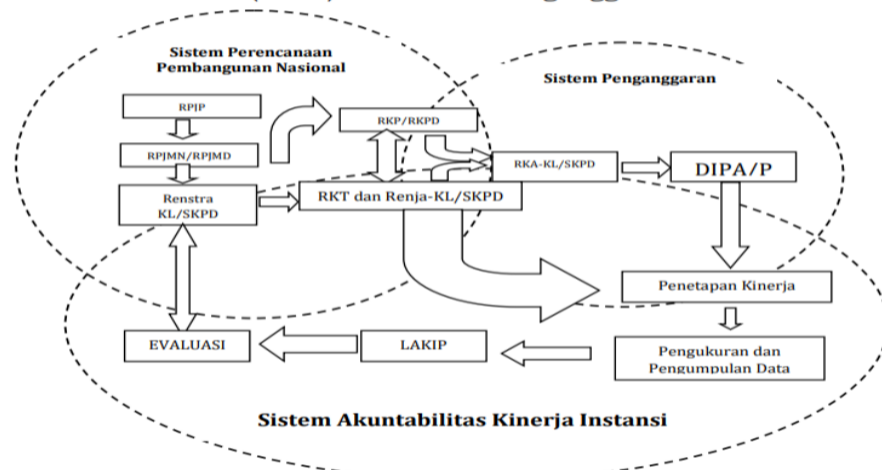
Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan yang mengacu kepada PermenPAN Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu instrumen untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dalam penyusunan RKT, perlu menjabarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan sebagai indikator kegiatan yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) dan kemudian dijabarkan lebih detail dalam rencana pencapaian kinerja melalui tahunan. Selain itu juga RKT diperlukan dalam melaksanakan arah kebijakan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, rencana aksi kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024.

Dalam menjalankan programnya, Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Tujuan, sasaran, indikator kinerja Pusdik SDM Kesehatan telah tertuang dalam RAK Pusdik SDM Kesehatan tahun 2020-2024, dan kemudian dijabarkan dalam rencana kinerja tahunan tahun 2024.

Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
(SAKIP)

Gambar 5. Keterkaitan SAKIP dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Sistem Penganggaran



B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025

1. Tujuan

Tujuan Strategis Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan tahun 2025 sebagai berikut :

- Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan
- Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit
- Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan
- Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi

2. Sasaran

Sasaran strategis Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan tahun 2025 sebagai berikut:

- Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan dengan target 75 persen
- Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit dengan target 38 orang
- Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan dengan target 91 persen

- d) Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi dengan target 93 persen

3. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Indikator kinerja kegiatan Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Kegiatan SDM Kesehatan, Renja K/L dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Target 2025
1.	Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit	Peserta pendidikan dokter spesialis berbasis Rumah Sakit pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)	Menghitung jumlah peserta pendidikan dokter spesialis berbasis Rumah Sakit pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) Sumber data: SK Penetapan Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU)	38
2.	Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan sesuai kebutuhan	Perbandingan jumlah penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dari internsip (khusus dokter dan dokter gigi) pada T-1 serta ditempatkan sesuai kebutuhan dengan jumlag penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan internsip T-1	Jumlah penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan interensip (khusus dokter danter gigi) pada T-1 serta ditempatkan sesuai kebutuhan dibagi dengan jumlah penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan internsip T-1 dikali 100% Sumber data : SK Penghentian peserta beasiswa	91
3.	Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang lulus Uji Kompetensi	Perbandingan jumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang lulus uji kompetensi dengan total jumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang	Jumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang lulus Uji Kompetensi dibagi dengan total jumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang mengikuti Uji Kompetensi di kali 100%	95

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Target 2025
		mengikuti Uji Kompetensi pada tahun berjalan		
4.	Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan	Perbandingan jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes T-1 yang diterima bekerja di sektor Kesehatan (fasilitas pelayanan kes pemerintah, swasta, TNI/POLRI, dan/atau sesuai bidangnya serta magang) dengan total jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes T-1 yang mengisi data penelusuran (tracer study), tidak termasuk lulusan yang melanjutkan pendidikan	Cara Perhitungan: Jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes T-1 yang diterima bekerja di sektor kesehatan (faskes pemerintah, swasta, TNI/POLRI, dan/atau sesuai bidangnya); melanjutkan pendidikan ke profesi atau jenjang yang lebih tinggi; dan magang) dibagi dengan total jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes T-1 yang mengisi data penelusuran (tracer study), tidak termasuk lulusan yang melanjutkan pendidikan dikali 100% Sumber Data: Data hasil tracer study masing-masing Poltekkes per tahun	75

Sejak tahun 2020 penyusunan program dan anggaran mengacu kepada SEB Nomor S-122/MK.2/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan 3 pilar penganggaran, yaitu penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Dalam penyusunan perencanaan dan anggaran tersebut diwajibkan untuk menerapkan 3 (tiga) klasifikasi anggaran yaitu klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Beberapa tujuan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga adalah mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja dan mendorong kementerian/Lembaga untuk menerapkan *value for money*. Untuk mencapai

tujuan tersebut dilakukan penyusunan rumusan pengukuran kinerja output, kualitas output dan hubungan output dengan outcome, merumuskan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan, keluaran (output) kegiatan yang mencerminkan “*real work*” (konkret). Rumusan output tersebut dibedakan menjadi Klasifikasi rincian output (RKO) dan rincian output (RO).

Dalam pencapaian indikator kinerja Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, ditetapkan pula indikator output kegiatan, rincian output dan target yang harus dicapai. Indikator output kegiatan tersebut mengakomodir dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dalam mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan sebagai target kinerja. Indikator Klasifikasi rincian output (RKO) dan Rincian Output (RO) Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan tahun 2025 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Berdasarkan KRO/RO Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2025

KODE RO	INDIKATOR	TARGER DIPA AWAL
ADA.002	Soal Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (SDM-21)	6 product
	Penyusunan Soal Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	
	Pelaksanaan Try Out Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	
	Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	
AEG.001	Konferensi dan Event Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan (SDM)	2 keg
	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Poltekkes Kemenkes Tingkat Nasional	
	Pelaksanaan Dosen Berprestasi	
AEH.001	Promosi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan	2 keg
	Edu Health Fair (Bussines Maching)	
AFA.001	Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Terintegrasi IDUKA (SDM-21)	9 NSPK
	Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
	Penyusunan Pedoman/Juknis/Juklak Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	

KODE RO	INDIKATOR	TARGER DIPA AWAL
AFA.002	Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan-Penyelenggara Utama (RSP-PU)	3 NSPK
	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama	
BDB.004	Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	38 Lembaga
	Manajemen Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes	
BDB.008	Fasilitasi Pengembangan Transformasi Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	38 Lembaga
	Pembinaan Teknis Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Poltekkes Kemenkes	
	Evaluasi dan Pengembangan Program Studi dan Sentra Unggulan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes	
	Fasilitasi Implementasi Kelas Internasional di Poltekkes Kemenkes	
	Pengembangan Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes	
	Fasilitasi Penyiapan Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes di Sektor Kesehatan	
BDD.002	Pengabdian Masyarakat Mendukung Germas	60 Kel Masy
	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	
DCI.001	Dosen dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kompetensinya terkait IDUKA dan AHS (SDM-21)	700 orang
	Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Melalui Pelatihan, Workshop dan Short Course (Jabatan Fungsional dan PTP dan PLP)	
	Pemagangan Dosen dan Tenaga Kependidikan (magang KJSU)	15 org
	Peningkatan kapasitas Dosen Prodi Kedokteran dan Tenaga Kependidikan (Pel.Pekerti)	200 org
FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah	1 wilayah
	Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah	
PBG.001	Akselerasi Rekomendasi Produksi Dokter dan Dokter Spesialis (SDM-21)	10 Rekomendasi Kebijakan,Kajian
	Advokasi dan Fasilitasi Pembukaan Fakultas Kedokteran	

KODE RO	INDIKATOR	TARGER DIPA AWAL
	Advokasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama	
QEJ.002	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat (SDM-21)	93 orang
QEJ.008	Bantuan Program Pendidikan SDM Kesehatan	7654 orang
	Bantuan Pendidikan PPDS/ PPDGS	1. PPDS?PPDGS : 185 orang 2. Sub Spesialis baru : 18 org 3. PPDS/PPDGS Lanjutan : 2615 org 4. SP-2 Lanjutan : 68 org 5. Penunjang : 500 orang
	Bantuan Pendidikan Dokter/Dokter Gigi	1. Lanjutan : 1610 orang 2. Baru : 800 orang 3. Penunjang : 196 orang
	Bantuan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan	Daerah : 1. Lanjutan : 1146 orang 2. Baru : 250 orang Pusat : 1. Lanjutan : 809 orang 2. baru :100 orang
	Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP/SPKKLP)	Lanjutan : 11 orang
	Bantuan Pendidikan Afirmasi Tenaga Kesehatan (PADINAKES)	

C. Pendanaan

Total Alokasi Anggaran Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp 557.424.490.000. Sampai dengan Februari masih terdapat blokir Kode A efisiensi sebesar Rp 121.980.665.000 dan blokir perjadiin sebesar Rp. 26.754.964.000.

1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja

Dalam mendukung tercapainya kinerja, dibutuhkan anggaran agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan. Alokasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Alokasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2025

No	Indikator	Target	Pagu Alokasi
1	IKK.17.3.1 Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan	75	3.329.134.000
2	IKK 17.3.5 Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit	38	6.594.976.000
3	IKK 17.3.6 Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan	91	438.738.695.000
4	IKK 17.3.7 Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi	93	766.953.000
Jumlah			449.429.758.000

2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Indikator Output Kegiatan

Untuk mencapai target IKK, Direktorat Tenaga Kesehatan telah menetapkan RKO/RO dengan mempertimbangkan kriteria output kegiatan dan alokasi anggaran agar dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Alokasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan Tahun 2025

KODE	KEGIATAN	DIPA AWAL	ANGGARAN DIPA AWAL	ANGGARAN EFEKTIF
ADA.002	Soal Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (SDM-21)	6 product	1,126,845,000	639,551,000
	Penyusunan Soal Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan			
	Pelaksanaan Try Out Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan			
	Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan			
AEG.001	Konferensi dan Event Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan (SDM)	2 keg	2,745,670,000	Blokir
	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Poltekkes Kemenkes Tingkat Nasional			
	Pelaksanaan Dosen Berprestasi			
AEH.001	Promosi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan	2 keg	1,535,533,000	Blokir
	Edu Health Fair (Business Maching)			
AFA.001	Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Terintegrasi IDUKA (SDM-21)	9 NSPK Menjadi 11 NSPK	755,030,000	805,994,000
	Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
	Penyusunan Pedoman/Juknis/Juklak Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan			

KODE	KEGIATAN	DIPA AWAL	ANGGARAN DIPA AWAL	ANGGARAN EFEKTIF
AFA.002	Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan- Penyelenggara Utama (RSP-PU)	3 NSPK	423,675,000	315,156,000
	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama			
BDB.004	Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	38 Lembaga	1,127,680,000	1,172,590,000
	Manajemen Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes			
BDB.008	Fasilitasi Pengembangan Transformasi Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	38 Lembaga	2,751,303,000	1,789,246,000
	Pembinaan Teknis Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Poltekkes Kemenkes			113,400,000
	Evaluasi dan Pengembangan Program Studi dan Sentra Unggulan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes			263,141,000
	Fasilitasi Implementasi Kelas Internasional di Poltekkes Kemenkes			402,400,000
	Pengembangan Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes			808,080,000
	Fasilitasi Penyiapan Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes di Sektor Kesehatan			202,225,000

KODE	KEGIATAN	DIPA AWAL	ANGGARAN DIPA AWAL	ANGGARAN EFEKTIF
BDD.002	Pengabdian Masyarakat Mendukung Germas	60 Kel Masy	12,338,247,000	Blokir
	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat			
DCI.001	Dosen dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kompetensinya terkait IDUKA dan AHS (SDM-21)	700 orang	3,441,770,000	870,775,000
	Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Melalui Pelatihan, Workshop dan Short Course (Jabatan Fungsional dan PTP dan PLP)			
	Pemagangan Dosen dan Tenaga Kependidikan (magang KJSU)	15 org		
	Peningkatan kapasitas Dosen Prodi Kedokteran dan Tenaga Kependidikan (Pel.Pekerti)	200 org		
FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah	1 wilayah	241,572,000	5,360,000
	Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah			
PBG.001	Akselerasi Rekomendasi Produksi Dokter dan Dokter Spesialis (SDM-21)	10 Rekomendasi Kebijakan,Kajian	1,270,981,000	615,991,000
	Advokasi dan Fasilitasi Pembukaan Fakultas Kedokteran			
	Advokasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama			
QEJ.002	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program	93 orang	10,602,330,000	7,435,950,000

KODE	KEGIATAN	DIPA AWAL	ANGGARAN DIPA AWAL	ANGGARAN EFEKTIF
	Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat (SDM-21)			
QEJ.008	Bantuan Program Pendidikan SDM Kesehatan	7654 orang	501,223,591,000	435,891,970,000
	Bantuan Pendidikan PPDS/ PPDGS	1. PPDS?PPDGS : 185 orang 2. Sub Spesialis baru : 18 org 3. PPDS/PPDGS Lanjutan : 2615 org 4. SP-2 Lanjutan : 68 org 5. Penunjang : 500 orang		
	Bantuan Pendidikan Dokter/Dokter Gigi	1. Lanjutan : 1610 orang 2. Baru : 800 orang 3. Penunjang : 196 orang		
	Bantuan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan	Daerah : 1. Lanjutan : 1146 orang 2. Baru : 250 orang PUSAT : 1. Lanjutan : 809 orang 2. baru :100 orang		
	Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP/SPKKLP)	Lanjutan : 11 orang		
	Bantuan Pendidikan Afirmasi Tenaga Kesehatan (PADINAKES)			
	JUMLAH		539,584,227,000	449,542,583,000

Sumber : SATU DIPA Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

Dalam rangka pencapaian target indikator yang tertuang dalam Renja K/L dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun rencana pencapaian target indikator dan rencana penarikan anggaran kegiatan Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan sampai dengan akhir tahun 2025.

A. Rencana Pencapaian Target Indikator

Rencana Pencapaian target di sesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan kegiatan pada setiap indikator.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui kemajuan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja kegiatan dan anggaran. Monitoring dilakukan setiap bulan dan triwulan dengan menggunakan e-performance, monev DJA (SMART-DJA) dan e-Monev Bappenas. Untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja di lakukan juga dengan menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan serta pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) sehingga dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan dapat memberikan masukan, arahan dan kritik terhadap pelaksanaan kinerja dan anggaran dalam periode berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

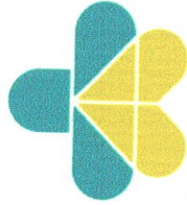
Dokumen RKT Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan Tahun 2025 merupakan komitmen dan sebagai pedoman untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan per tahunnya sebagai upaya dalam mendukung tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras sumber daya yang ada di Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan dengan memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan kegiatan karena keberhasilan suatu organisasi apabila penggunaan anggaran dapat dilaksanakan dengan efisien, namun dapat menghasilkan output yang berkualitas dan bermanfaat.

Dengan tersusunnya dokumen RKT ini, diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta memberikan gambaran perencanaan pelaksanaan kegiatan di Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan Tahun 2025.

LAMPIRAN

**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DIREKTORAT PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D

Jabatan : Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. Yuli Farianti, M.Epid

Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,

dr. Yuli Farianti, M.Epid

Pihak Pertama

Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

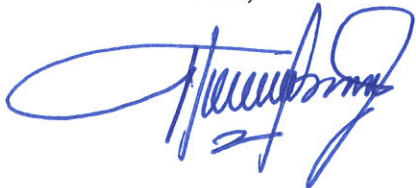
No	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			
1	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan	1. Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan	900
		2. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan dokter	100
		3. Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan	1.314
		4. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur pendidikan	1.660
		5. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan SDM Kesehatan	90
		6. Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan	100
		7. Jumlah Perguruan Tinggi yang melaksanakan program AHS	70
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemkes	8. Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas	50
Program : Dukungan Manajemen			
2	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya	9. Presentase rekomendasi hasil pengawasan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti	95
		10. Persentase realisasi anggaran Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan	96

*) Dipertanggungjawabkan apabila terdapat rekomendasi hasil pengawasan BPK RI

Kegiatan	Anggaran	
Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	Rp	557.424.490.000
TOTAL	Rp.	557.424.490.000

Jakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,



dr. Yuli Farianti, M.Epid

Pihak Pertama,



Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D



**DIREKTORAT PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Kurniati
Jabatan : Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yuli Farianti
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua,



Yuli Farianti

Pihak Pertama,



Anna Kurniati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Kegiatan : Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi			
1	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	IKK 17.3.1 Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima bekerja di sektor kesehatan	75%
Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi SDM Kesehatan			
2	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi SDM Kesehatan	IKK 17.3.5 Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit	38 Orang
		IKK 17.3.6 Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan	91%
		IKK 17.3.7 Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi	93%
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan			
3	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	IKD 33.1 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan	96%

Keterangan :

* : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)

** : Kolaborator (Target Indikator Kinerja tidak ditampilkan)

IKM : Indikator Kinerja Mandatory Program Dukungan Manajemen

IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

Kegiatan	Anggaran
Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi SDM Kesehatan	Rp 528.902.645.000
Pendayagunaan SDM Kesehatan (Pendayagunaan Residen RSPPU)	Rp 1.865.917.000
Total Anggaran	Rp 530.768.562.000

Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua,



Yuli Fianti

Pihak Pertama,



Anna Kurniati